

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dalam upaya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat tidak mampu. Tujuan program dana bantuan sosial adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial yang mungkin timbul.

Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 program bantuan sosial merupakan salah satu bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok /anggota masyarakat, individu, dan keluarga yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap masyarakat (Mariswara, 2016).

Dana bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah tidak sedikit dan cenderung bertambah. Data jumlah dana bantuan sosial yang di alokasikan pemerintah pada tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Dana Bantuan Sosial 2019-2020

Tahun	Realisasi	(%)
2020	202.5 Triliun	1.31 %
2021	161.4 Triliun	0,91 %

Sumber : Kemenkeu, (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kementerian keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi dana bantuan sosial pada tahun 2020 sebesar RP 202.5 triliun. Realisasi ini mencapai 1,31% terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 sebesar RP 161.4 triliun, angka ini meningkat hingga 0,91% terhadap PDB, penyaluran dana bantuan sosial rawan disalahgunakan dari tujuan awalnya, yaitu untuk kesejahteraan sosial (kementerian Keuangan, 2021)

Potensi terjadi penyimpangan atau korupsi sangat tinggi mengingat alokasi dana bantuan sosial yang sangat besar. Kepolisian Indonesia mengungkap bahwa setidaknya terdapat 102 kasus dugaan penyelewengan dana bansos di Indonesia Anonim (2020). *Fraud* adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk memperkaya atau mendapatkan keuntungan diri sendiri, orang lain, atau badan hukum lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Karyono, 2013)

Pada dasarnya pengelolaan keuangan pemerintah harus dilakukan oleh setiap anggota dalam organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan integritas yang tinggi. Selain itu diperlukan juga suatu sistem kontrol yang baik. Kontrol dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud*. Menurut Sudarmanto (2021) Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut . Oleh sebab itu untuk mewujudkan pencegahan pemerintah membuat sistem pengawasan dan pengontrolan pada kinerja pemerintahan. Kegiatan tersebut diberi nama Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan dalam PP nomor 60 tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian Internal Pemerintah sangat penting dilakukan karena menyangkut bentuk pengawasan dan pencegahan terhadap segala bentuk kelalaian yang disengaja dan tidak sengaja yang merugikan negara. Pengendalian internal adalah suatu sistem dalam organisasi untuk mencegah semua tindakan pemborosan, kecurangan dan ketidak efisienan penggunaan sumber daya. Sistem pengendalian internal

pemerintah dibuat untuk memberikan pengamanan terhadap aset serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan.

Menurut Kalendesang dkk (2017) sistem pengendalian sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah, karena dengan adanya sistem pengendalian internal maka kecurangan yang mungkin dilakukan pegawai dapat di minimalisir. Oleh karena itu setiap entitas pemerintah membuat dan menjalankan sistem pengendalian internal demi kelancaran dan kemajuan organisasi. Adapun unsur-unsur yang perlu diperhatikan adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian; dan pemantauan.

Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau lembaga tentang pengendalian internal. Penilaian resiko berkaitan dengan pengendalian internal dalam sub ini yaitu melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan-sasarannya. kemudian menganalisis resiko yang mungkin terjadi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kegiatan pengendalian tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Informasi dan komunikasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

Fornas laporkan dugaan korupsi dana bantuan sosial kota Palembang, sebagaimana pernyataan dari Okta Candra selaku Koordinator aksi yang di lansir dari Gagasanindonesia.com (2020) mengatakan “Pihaknya mendatangi langsung nama-nama yang tertera dalam dokumen pemberian Bansos, namun menurut pengakuan pihak yang bersangkutan mereka tidak menerima bantuan sama sekali sehingga menyebabkan pelaksanaan penerima bantuan masih kurang dirasakan masyarakat, adanya penolakan atau protes dari berbagai elemen masyarakat dan

masih adanya tumpang tindih dalam pembagian bansos sehingga mendidik masyarakat korupsi dan nepotisme,” Kata dia.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang dilansir dari Linksumsel.co.id (2022) “BPK memeriksa kinerja pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial kota Palembang. BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial di pemerintah daerah diantaranya pelaksanaan verifikasi dan validitas belum memadai dalam menghasilkan data input yang berkualitas serta belum mempunyai mekanisme untuk memastikan pelaksanaan verifikasi dan validitas sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk penyaluran bantuan sosial. Hal tersebut menyebabkan DTKS yang ditetapkan oleh kemensos sebagai dasar penyaluran program bantuan sosial menjadi kurang andal dan tidak akurat”.

Penelitian Putri (2018) mengemukakan bahwa unsur-unsur SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan aktivitas pengendalian terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan laporan keuangan pengelolaan dana bansos. Oleh sebab itu, semakin baik pelaksanaan SPIP di instansi pemerintahan, maka laporan keuangan pengelolaan dana bansos yang dihasilkan akan semakin handal.

Penelitian Irawan (2016) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) (Studi pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Andir Kota Bandung). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana BOS.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan sasaran penelitian, di mana pada penelitian terdahulu menggunakan objek sekolah dan sasarannya pada pengelolaan dana

BOS. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian dinas sosial, adapun sasaran penelitian terfokus pada pengelolaan dana Bantuan sosial.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota Palembang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti terkait dengan sub variabel sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu :

1. Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang?
2. Apakah penilaian resiko berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang?
3. Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang?
4. Apakah informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang?
5. Apakah pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang?
6. Apakah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini bisa dilakukan dengan lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, pemantauan dan pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Palembang, dimana sampelnya di ambil dari seluruh pegawai di Dinas Sosial tahun 2022.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang
2. Mengetahui pengaruh penilaian resiko terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang
3. Mengetahui pengaruh aktivitas pengendalian terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang
4. Mengetahui pengaruh informasi dan komunikasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang
5. Mengetahui pengaruh pemantauan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang
6. Mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang

1.4.2 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan, gambaran, dan bukti empiris tentang unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecuramgan (*fraud*) Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menentukan kebijakan terkait dengan unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*) Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial. sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Palembang.

3. Bagi Lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan literature yang bermanfaat khususnya di jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik bahan bacaan dan referensi untuk penulis yang akan datang.